

Penggunaan ADD di Desa Barungkersap Diduga Dijadikan Proyek Kotor Kades

Anita Manua - KARO.XPRESS.CO.ID

Feb 7, 2025 - 13:33



Proyek Pembukaan Jalan Tahun 2022, Dikerjakan Tahun 2024

KARO - Penggunaan anggaran dana desa (ADD) untuk membangun desa di Desa Barungkersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, diduga dijadikan proyek 'Kotor' kepala desa.

Pasalnya, sejumlah proyek pembangunan fisik dan kegiatan sumber daya masyarakat desa, sengaja 'Dimonopoli' pekerjaannya karena tidak melibatkan masyarakat.

Menurut sejumlah warga yang enggan menyebut namanya, Kamis (06/02-2025) mengatakan, sejak Tobat Peranginangin menjabat sebagai kepala desa. Masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk berswadaya dalam pembangunan.



Pengerasan Jalan/
Telford 'Kupak-kapik'
Indonesia.satu.co.id

Bahkan, sejumlah proyek fisik yang telah rampung dikerjakan sudah 'Kupak-kapik' alias hancur. Warga menduga pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi rencana anggaran biaya (RAB).

Bahan material berupa semen, pasir dan batu sengaja dikurangi, demi mencari

keuntungan untuk memperkaya diri. Mirisnya lagi, istri kades juga turut menjadi anggota perangkat desa.

"Istrinya saja dikasih jabatan sebagai kaur. Jadi dia duanyalah yang mengatur semua anggaran. Mulai dari kegiatan proyek, kami tidak pernah dilibatkan. Intinya kades tidak transparan," ujarnya.



Bayangkan saja, tambahnya lagi, pernah juga ada pengadaan tempat sampah dan obat cair untuk pencegah lalat buah. Itupun kades sendiri yang buat, asal muasal obatnya masyarakat tidak tahu.

"Obat cairnya itu sudah diisinya didalam botol Aqua dan digantungkan disepanjang pagar jalan. Jadi kita masyarakat gak tahu itu obat apa. Karena tidak ada label dibotolnya dan disosialisasikan. Tempat sampah dari keranjang jeruk, sengaja dibuat-buatnya agar terkesan ada kegiatan," beberyna diamini rekannya.

Dikatakannya, sejumlah kegiatan pembangunan seperti pengerasan jalan (Telford), parit dan rabat beton yang baru saja dibangun sudah 'Kupak-kapik. Ada juga proyek pembukaan jalan yang dianggarkan tahun 2023, malah dikerjakannya di tahun 2024 ini.



"Jadi kami minta, aparat penegak hukum segera turun ke desa. Camat juga harus mengevaluasi jabatan istrinya sebagai kaur. Apakah itu menyalahi aturan atau seperti apa," ketusnya.

Ia juga berharap, agar wartawan dapat turun langsung ke desa untuk melihat semua proyek yang ada di desa. "Kami menduga, anggaran dana desa yang dikelolanya telah disalahgunakan untuk memperkaya diri," ungkapnya mengakhiri.

(Anita Theresia Manua)